



KEMENTERIAN KEUANGAN WIDE

VISI

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

Stakeholder Perspective

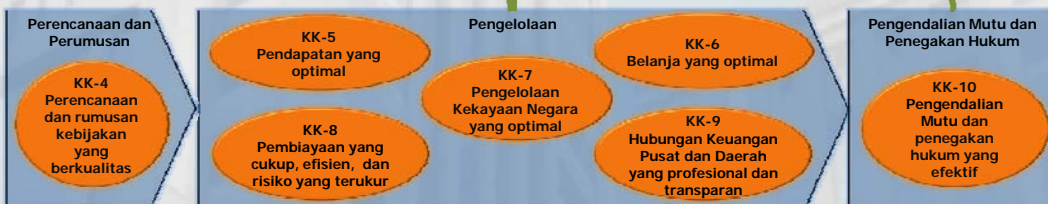
- Presiden
- DPR
- BPK
- K/L
- Pemda
- Masyarakat

Customer Perspective

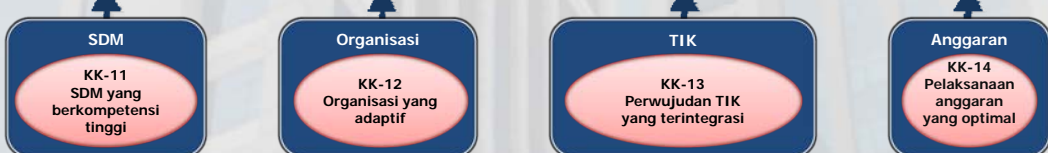
KK-2
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

KK-3
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

Internal Process Perspective



Learning and Growth Perspective



No	Uraian IKU	Target 2013
KK-1.1	Rasio pajak terhadap PDB	16%
KK-1.2	Rasio utang terhadap PDB	23%
KK-1.3	Rasio defisit APBN terhadap PDB	1,6%
KK-1.4	Indeks opini BPK atas LKPP	4 (WTP)
KK-1.5	Indeks pemerataan keuangan antar daerah	0,76
KK-2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan	4
KK-3.1	Rata-rata persentase kepatuhan pengguna layanan	88,17%
3.1.1	Persentase tingkat kepatuhan formal WP	65%
3.1.2	Persentase pengguna jasa kepabeanan yang tidak diblokir	95%
3.1.3	Persentase Penerapan KPJM oleh penanggung jawab program	80%
3.1.4	Persentase rekonsiliasi realisasi APBN yang andal dan tepat waktu	97%
3.1.5	Persentase penyampaian APBD tepat waktu	97%
3.1.6	Persentase kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L	95%
KK-4.1	Deviasi proyeksi kebijakan fiskal	6%
KK-4.2	Waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK	10 hari kerja
KK-5.1	Jumlah pendapatan negara	1.525,188 T
5.1.1	Jumlah penerimaan pajak	1.042,285 T
5.1.2	Jumlah penerimaan bea dan cukai	150,708 T
5.1.3	Jumlah PNBPN nasional	332,195 T
KK-6.1	Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L	90%
KK-6.2	Persentase dana blokir	2%
KK-6.3	Persentase ketepatan waktu penyelesaian revisi Anggaran non APBN-P	100%
KK-7.1	Nilai kekayaan negara yang diutilisasi	105 T
KK-7.2	Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertifikatkan	80% (1600/2000 bidang)
KK-8.1	Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan	110%
KK-8.2	Persentase pencapaian target <i>effective cost</i>	100%
KK-8.3	Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang	100%
KK-9.1	Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah transfer ke daerah	100%
KK-9.2	Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	93%

No	Uraian IKU	Target 2013
KK-10.1	Rata-rata persentase penegakan hukum	54,17 %
10.1.1	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	75%
10.1.2	Persentase pencairan piutang pajak	35%
10.1.3	Persentase hasil penyidikan DJP yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	50%
10.1.4	Persentase hasil penyidikan DJBC yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	55%
10.1.5	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	75%
10.1.6	Persentase pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai	35%
KK-10.2	Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden	80%
KK-10.3	Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA K/L	85%
KK-10.4	Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999	4 (WTP)
KK-11.1	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	87%
KK-11.2	Persentase diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi	90%
KK-11.3	Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat	50%
KK-11.4	Persentase penyelesaian <i>blueprint</i> manajemen SDM	100%
KK-11.5	Persentase akurasi data SIMPEG	100%
KK-12.1	Nilai reformasi birokrasi	92
KK-12.2	Persentase <i>policy recommendation</i> hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90%
KK-12.3	Persentase penyelesaian <i>blueprint</i> Transformasi Kelembagaan	100%
KK-12.4	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	55 (<i>risk defined</i>)
KK-13.1	Persentase integrasi TIK Kemenkeu	80%
KK-13.2	Persentase <i>downtime</i> layanan TIK	5%
KK-14.1	Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)	95%
KK-14.2	Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA	98%

No	Uraian IKU	Realisasi 2012	Target 2013	Perspektif
1	KK-1.1 Rasio pajak terhadap PDB	N/A	16%	Stakeholder Perspective (20%)
2	KK-1.2 Rasio utang terhadap PDB	N/A	23%	
3	KK-1.3 Rasio defisit APBN terhadap PDB	N/A	1,6%	
4	KK-1.4 Indeks opini BPK atas LKPP	N/A	4 (WTP)	
5	KK-1.5 Indeks pemerataan keuangan antar daerah	0,74	0,76	
6	KK-2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan	3,91	4	Customer Perspective (20%)
7	KK-3.1 Rata-rata persentase kepatuhan pengguna layanan	N/A	88,17%	
	KK-3.1.1 Persentase tingkat kepatuhan formal WP	53,5%	65%	
	KK-3.1.2 Persentase pengguna jasa kepabeanan yang tidak diblokir	N/A	95%	
	KK-3.1.3 Persentase Penerapan KPJM oleh penanggung jawab program	N/A	80%	
	KK-3.1.4 Persentase rekonsiliasi realisasi APBN yang andal dan tepat waktu	N/A	97%	
	KK-3.1.5 Persentase penyampaian APBD tepat waktu	97%	97%	
	KK-3.1.6 Persentase kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L	99,22%	95%	
8	KK-4.1 Deviasi proyeksi kebijakan fiskal	3,42%	6%	Internal Process Perspective (30%)
9	KK-4.2 Waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK	N/A	10 hari kerja	
10	KK-5.1 Jumlah pendapatan negara	1.324,72 T	1.525,188 T	
	KK-5.1.1 Jumlah penerimaan pajak	835,26 T	1.042,285 T	
	KK-5.1.2 Jumlah penerimaan bea dan cukai	144,46 T	150,708 T	
	KK-5.1.3 Jumlah PNPB nasional	345 T	332,195 T	
11	KK-6.1 Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L	88,21%	90%	
12	KK-6.2 Persentase dana blokir	1,45%	2%	
13	KK-6.3 Persentase ketepatan waktu penyelesaian revisi Anggaran non APBN-P	N/A	100%	
14	KK-7.1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi	103,31 T	105 T	
15	KK-7.2 Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertifikatkan	N/A	80% (1600/2000 bidang)	
16	KK-8.1 Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan	129%	110%	
17	KK-8.2 Persentase pencapaian target <i>effective cost</i>	80,58%	100%	
18	KK-8.3 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang	98,13%	100%	
19	KK-9.1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah transfer ke daerah	100,18%	100%	
20	KK-9.2 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	107,00%	93%	

No	Uraian IKU	Realisasi 2012	Target 2013	Perspektif
21	KK-10.1 Rata-rata persentase penegakan hukum	59,63%	54,17%	Internal Process Perspective (30%)
	KK-10.1.1 Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	N/A	75%	
	KK-10.1.2 Persentase pencairan piutang pajak	32,30%	35%	
	KK-10.1.3 Persentase hasil penyidikan DJP yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	54,00%	50%	
	KK-10.1.4 Persentase hasil penyidikan DJBC yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	82,50%	55%	
	KK-10.1.5 Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	84,55%	75%	
	KK-10.1.6 Persentase pelaksanaan audit terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai	8,07%	35%	
22	KK-10.2 Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden	83,31	80%	Learning & Growth Perspective (30%)
23	KK-10.3 Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA K/L	83,73%	85%	
24	KK-10.4 Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999	3,88	4 (WTP)	
25	KK-11.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	85,90%	87%	
26	KK-11.2 Persentase diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi	100%	90%	
27	KK-11.3 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat	N/A	50%	
28	KK-11.4 Persentase penyelesaian <i>blueprint</i> manajemen SDM	N/A	100%	
29	KK-11.5 Persentase akurasi data SIMPEG	99,98%	100%	
30	KK-12.1 Nilai reformasi birokrasi	93,53	92	
31	KK-12.2 Persentase <i>policy recommendation</i> hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92,86%	90%	
32	KK-12.3 Persentase penyelesaian <i>blueprint</i> Transformasi Kelembagaan	N/A	100%	
33	KK-12.4 Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	N/A	55 (<i>risk defined</i>)	
34	KK-13.1 Persentase integrasi TIK Kemenkeu	53,78%	80%	
35	KK-13.2 Persentase <i>downtime</i> layanan TIK	N/A	5%	
36	KK-14.1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)	85,26%	95%	
37	KK-14.2 Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA	N/A	98%	